

PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN
KOTA MEDAN

SKRIPSI

OLEH :

ELFA SAFIRA

NPM : 1603100103

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA

MEDAN

2020

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **ELFA SAFIRA**
N P M : 1603100103
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.45 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP** (.....)

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H** (.....)

PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.Ip., M.Pd** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

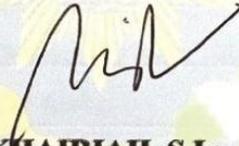
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **ELFA SAFIRA**
N P M : 1603100103
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Publik
Judul Skripsi : Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan

Medan, 10 Maret 2020

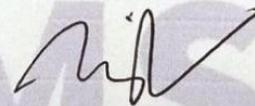
PEMBIMBING



NALIL KHAIRIAH, S.Ip., M.Pd

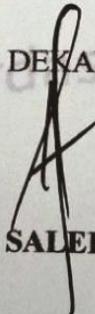
Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini Saya, Elfa Safira NPM 1603100103 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 08 Maret 2020

Yang menyatakan,



Elfa Safira

ABSTRAK

PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN

Elfa Safira

NPM 1603100103

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program pembangunan. Dengan perkembangan teknologi dan informasi proses musyawarah menggunakan E-Musrenbang yakni musrenbang berbasis elektronik dapat menyerap aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan E-musrenbang dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan tingkat kelurahan di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanyak delapan orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan melalui E-musrenbang di tingkat kelurahan Kota Medan dapat dikatakan sudah efektif dari segi kejelasan tujuan, perencanaan E-Musrenbang yang dipahami oleh implementor dalam penyusunan prioritas usulan, namun dalam pengusulan program belum tepat sasaran. Kemudian sudah tersedianya sebagian besar sarana dan prasarana seperti komputer yang terakses internet di setiap kelurahan untuk memasukan usulan ke dalam aplikasi E-Musrenbang sehingga memudahkan usulan yang direncanakan dan disusun dari hasil rembuk warga. Selanjutnya E-Musrenbang sudah transparan karena dapat dilihat melalui situs E-Planning www.beta.pemkomedan.go.id. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk menghadiri musrenbang sudah cukup baik namun tidak semua bisa hadir karena beberapa faktor rutinitas kegiatan. Akuntabilitas yang ada di kelurahan hanya sebatas mengumpulkan usulan yang akan di bahas di kecamatan, kota dan provinsi, yang akan direalisasikan kepada OPD terkait. Dengan demikian pemanfaatan E-musrenbang sudah lebih baik dari sebelumnya sehingga kedepannya usulan yang direncanakan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat direalisasikan usulan yang telah di susun dan di sahkan.

Kata Kunci : Efektivitas, *Electronic* Musrenbang, Perencanaan Pembangunan daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan bagi umat manusia dengan Ilmu Pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggungjawab intelektual sebagai seorang mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul “ Pemanfaatan E-Musrenbang dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kelurahan Kota Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada nama – nama dibawah ini.

1. Teristimewa kepada orangtua penulis Ir. Elfis dan Fatimah yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Arifin Saleh Siregar, S.Sos, M.Sp selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

4. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Dosen – dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berbagi pengetahuan dan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Seluruh pegawai Biro Bang Naldi, Kak Ayu, Bang Parlindungan, Bang Beni, dan Kak Dini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Siti Khalijah S.H selaku Kepala Sub Bagian Umum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan
8. Bapak Taufik Teguh Pribadi S.Kom selaku Staff Sub Bagian Keuangan yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
9. Bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo Brayan Kota yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
10. Bapak Muhammad Ilfan S.E selaku Lurah Sei Kera Hilir 1 yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian

11. Bapak Bahagia Ismail Jaya selaku Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pusat Pasar yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
12. Bapak Aulia Ahmad S.STP.,M.Si selaku Lurah Gaharu yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
13. Bapak Bangsawan Pasaribu S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
14. Bapak Abdan Ependi Ritonga S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Denai yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
15. Ibu Sahara Harahap,AP selaku Lurah Harjosari 1 yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian
16. Untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai wadah penulis dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dan pengalaman.
17. Untuk sahabat spesial Kartika Surya selama kuliah yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
18. Untuk sahabat seperjuangan Lita Wijayanti, Dilla Nazar Siregar, Nining Prowoningsih, Shally Anggaraini Utami dan Resty Nawati Wau yang sudah memberikan motivasi, doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

19. Untuk sahabat SGK Team Eni Lirian, Azizah Simatupang, Siti Auliyatun Nisa dan Irvany Sari yang sudah memberi doa dan dukungan selama penulis melakukan penelitian.
20. Seluruh teman - teman Mahasiswa/i Administrasi Publik stambuk 2016 Administrasi Publik Konsentrasi kelas Pembangunan D.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak terima kasih. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik untuk kedepannya, Aamiin.

Medan, 08 Maret 2020

Penulis

Elfa Safira

Npm:1603100103

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Pengertian pemanfaatan	10
2.2 Konsep perencanaan	10
2.2.1 Fungsi Perencanaan	11
2.2.2 Tujuan Perencanaan	12
2.2.3 Manfaat Perencanaan	12
2.2.4 Langkah-langkah penyusunan perencanaan.....	13
2.2.5 Jenis-jenis perencanaan	14

2.2.6	Perencanaan yang berhasil	15
2.3	Pengertian Efektivitas	15
2.3.1	Ukuran efektivitas	16
2.3.2	Faktor yang mempengaruhi efektivitas	17
2.4	Pengertian Musrenbang	18
2.4.1	Tahap Perencanaan Pasca-Musrenbang Kab/Kota	19
2.4.2	Tahap Pelaksanaan Pasca-Musrenbang Kab/Kota	19
2.5	Pengertian E-Musrenbang	20
2.6	Konsep Perencanaan Pembangunan daerah	20
2.6.1	Tujuan Perencanaan Pembangunan	21
2.6.2	Tahapan Perencanaan Pembangunan	21
2.7	Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Kerangka Konsep	28
3.3	Defenisi Konsep	28
3.4	Kategorisasi	30
3.5	Narasumber	30
3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7	Teknik Analisis Data	33
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.9	Deskripsi Lokasi Penelitian	36

3.9.1	Visi Pembangunan Kota Medan Tahun 2016-2021.....	36
3.9.2	Misi Pembangunan Kota oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2016-2021.....	36
3.9.3	Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan	37
3.9.4	Struktur Organisasi Kelurahan	38
3.9.5	Profil Kelurahan Kota Medan	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	44
4.1.1	Deskripsi Narasumber	44
4.2	Pembahasan	46
4.2.1	Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	46
4.2.2	Analisis Hasil Wawancara	62

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan	74
5.2	Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perencanaan dan Proses Penganggaran Bottom Up	23
Gambar 3.1	Kerangka Konsep	28
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Kelurahan Kota Medan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.9.5	Jumlah Penduduk di Kelurahan Kota Medan.....	43
Tabel 4.1.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	45
Tabel 4.1.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	45
Tabel 4.1.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan	46
Tabel 4.2.2	Sarana Prasarana Kelurahan	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: SK- I Permohonan Penetapan Judul
Lampiran IV	: SK- II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK- III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK – IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK – V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran IX	: Pedoman Wawancara
Lampiran X	: Curriculum <i>Vitae</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah ditentukan oleh kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana perencanaan menjadi penunjuk arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan warga dengan target yang jelas dan terukur. Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya perencanaan dapat menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, kebijakan, program, prosedur, metode dan standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan perencanaan yang dimaksud agar memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan, membantu peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi. Tujuan yang diinginkan juga harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami dengan mudah, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Untuk dapat melakukan perencanaan dengan baik diperlukan informasi yang memadai.

Permasalahan utama perencanaan pembangunan di Indonesia terletak pada pelaksanaannya, khususnya kelayakan rencana aparatur pelaksana. Sementara itu, permasalahan kelayakan rencana terletak pada keterbatasan statistik dan keterbatasan pada kemampuan tenaga perencana. Permasalahan pada aparatur

pelaksana terletak pada kurangnya dukungan elite politik dan masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Perencanaan yang disusun harus mampu menjabarkan visi dan misi jangka panjang secara lebih terperinci. Penjabaran ini memerlukan pemikiran yang komprehensif dan integrasi perkembangan semua aspek terkait dengan proses pembangunan yang dilakukan melalui pengkajian strategis masa. Selain pemikiran yang komprehensif, diperlukan juga suatu bentuk perencanaan yang partisipatif. Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat dan mengikuti perubahan zaman juga tidak dapat dipisahkan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang bagi pengaksesan, pengelolaan untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat dan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah. Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat dan semakin tinggi taraf perkembangan pembangunan semakin canggih dan beragam pula teknologi yang dibutuhkan.

Berdasarkan peraturan kemendagri No.98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang bertujuan untuk merumuskan

rencana pembangunan daerah secara transparan, efektif, efisien dan responsive, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka dirancang suatu system aplikasi yang berbasis elektronik yaitu E-planning. E-planning adalah aplikasi perencanaan berbasis elektronik untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). E-planning dibuat untuk memudahkan penggunaanya menginput usulan perencanaan pembangunan yang diantaranya meliputi tingkat kelurahan, kecamatan, SKPD, dan Bappeda untuk mengelola dalam penyusunan seperti data usulan masyarakat, mulai dari usulan tingkat kelurahan, kecamatan, penyusunan RKPD murni, RKPD perubahan, dan KUA PPAS perubahan.

Aplikasi ini dibangun untuk menyelesaikan masalah tersebut agar dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD).

Aplikasi E-planning terdapat 2 sub aplikasi yang saling terkait yaitu E-Musrenbang dan E-Budgeting. Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan

memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah melalui badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di kelurahan dilaksanakan selama bulan Januari. (Dikutip dari Situs Solo KotaKita).

E-Musrenbang merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan penggunaanya dari level yang paling bawah yaitu kelurahan. Untuk mengelola data usulan tersebut nantinya akan dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu BAPPEDA sebagai pengelola perencanaan. Data usulan yang dientrikan oleh kelurahan dapat diatur berdasarkan prioritas, dan kelurahan juga dapat mengatur data usulan yang mana nantinya akan dinaikkan ke kecamatan. Jika tidak dinaikkan maka data tersebut dijadikan arsip dan dapat dibahas di tahun berikutnya. Selanjutnya dari kecamatan, data akan dikirimkan ke SKPD yang nantinya akan dimusyawarahkan kembali di DPRD. Hasil Akhir dari E-Musrenbang adalah hasil rekapitan usulan yang dikirimkan oleh seluruh kecamatan yang telah disetujui oleh SKPD dan Bappeda.

Kota Medan terletak antara $3^{\circ}.27'$ - $3^{\circ}.47'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}.35'$ - $98^{\circ}.44'$ Bujur Timur dengan ketinggian 2,5 – 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur. Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat

pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan, 151 kelurahan dan 2001 lingkungan.

Penggunaan aplikasi E-Musrenbang sudah diterapkan oleh seluruh kecamatan dan kelurahan. Setiap kelurahan dan kecamatan juga aktif dalam penginput usulan yang dilakukan setahun sekali pada awal tahun di bulan Januari. Dalam menginput usulan terdiri dari beberapa pilihan yaitu dari segi infrastruktur, pengembangan ekonomi, fasilitas pelayanan publik, keamanan dan lain-lain. Dilihat dari hasil monitoring rembuk usulan di tahun 2018 dan 2019 yang dapat dilihat dari website E-planning kota Medan, berbagai macam usulan perencanaan dimasukan seperti perlengkapan kerja kantor, perbaikan jalan, penerangan lampu jalan, pelatihan UMKM dan berbagai macam lainnya.

Sebelum adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan tidak dapat dilihat secara transparan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan, karena pada dasarnya perencanaan yang berhasil adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti salah satunya yaitu dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan dalam melakukan perencanaan dan merasakan manfaatnya secara langsung. Kegagalan dalam pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, kurangnya pemahaman masyarakat, dan rakyat tidak diikut sertakan.

Selain itu dari segi pemerintah terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan perencanaan. Adapun beberapa permasalahan lainnya yang tertera dalam dokumen Renstra BAPPEDA adalah masih adanya aparatur di organisasi pemerintahan yang kesulitan dalam menyusun perencanaan, dikarenakan kurangnya pengetahuan perencanaan dibidang aturan tentang penyusunan dokumen perencanaan, dukungan data capaian/realisasi kinerja dan anggaran, kesulitan dalam menganalisis capaian kinerja baik antar waktu, antar wilayah, serta relevansi sehingga sasaran program dan kegiatan belum tercapai seperti apa yang diharapkan. Masih relatif rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan SKPD. Belum optimalnya forum SKPD dalam menampung usulan yang dihasilkan dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan. Kurangnya publikasi dan sosialisasi hasil Musrenbang. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hasil Musrenbang. Oleh karena itu, meningkatnya tuntutan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kota yang partisipatif, transparan dan akuntabel menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota medan.

Oleh karena itu, penerapan E-Musrenbang diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan adanya aplikasi E-Musrenbang perencanaan pembangunan di kota medan bisa terkelola dengan baik dan tercapai prinsip-

prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektif, efisien dan berkeadilan. Dan dengan didukung oleh tiga pilar utama pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat). Di samping itu penyelenggara pemerintahan harus responsive terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang daripada melakukan control serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: “Bagaimana Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan ?”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam masalah yang ada.
3. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, peumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Pemanfaatan, Pengertian Musrenbang, Pengertian Efektivitas, Pengertian Perencanaan, Pengertian Perencanaan pembangunan, Pengertian Efektivitas Perencanaan Pembangunan daerah .

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini membuat kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diteliti

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002 : 125).

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

2.2 Konsep Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

Menurut Conyers dan Hills, perencanaan merupakan suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. (Kuncoro, 2012:50)

Berdasarkan definisi tersebut terdapat empat elemen dasar perencanaan yaitu:

- a. Merencanakan berarti memilih
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
- c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
- d. Perencanaan hanya berorientasi ke masa depan

2.2.1 Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Menurut Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Hasibuan, 2011:92)

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inti perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

2.2.2 Tujuan Perencanaan

Tujuan dapat dicapai dengan beberapa cara, diantaranya adalah :

- (1) Menentukan tujuan-kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan program-program
- (2) Memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
- (3) menjadikan tindakan ekonomis, karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan.

2.2.3 Manfaat Perencanaan Menurut Bintoro Tjokroamidjojo.

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga

mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminim mungkin.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya perencanaan dipandang sangat penting, untuk dapat menjamin sistematisasi pelaksanaan pembangunan. Untuk ini hal yang perlu dipahami adalah proses perencanaan atau tahapan-tahapan di dalam penyusunan perencanaan tersebut.

2.2.4 Langkah- langkah dalam menyusun perencanaan

- 1) Merumuskan Misi dan Tujuan. Usaha sistematis formal untuk menggariskan wujud utama dari perusahaan , sasaran-sasaran, kebijakan kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran-sasaran dan wujud utama perusahaan yang bersangkutan.

- 2) Memahami Keadaan Saat ini. Perencanaan menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang, untuk mengenal sistematis peluang dan ancaman dimasa mendatang. Dengan pilihan langkah-langkah yang tepat akan lebih menguntungkan perusahaan. Meliputi jangka pendek dan sampai jangka panjang.
- 3) Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya Tujuan. Segala kemudahan dan kemungkinan hambatan dalam usaha mencapai tujuan perlu sedini mungkin diidentifikasi, agar persiapan dapat dilakukan. Disatu pihak perusahaan dapat meraih kemudahan dan manfaat optimal dengan kesempatan yang tersedia
- 4) Menyusun rencana Kegiatan untuk mencapai Tujuan.

2.2.5 Jenis - jenis perencanaan

Perencanaan jika dilihat berdasarkan jangka waktu berlakunya

1. Rencana Jangka Panjang (long term planning) adalah perencanaan yang berlaku antara 10 s/d 25 tahunan.
2. Rencana Jangka Menengah (medium range planning) adalah perencanaan yang berlaku di antara 5 s/d 7 tahunan.
3. Rencana Jangka Pendek (short range planning) adalah perencanaan umumnya berlakunya hanya untuk sekitar 1 tahun.

2.2.6 Perencanaan yang berhasil

1. Prinsip partisipatif

Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

2. Prinsip kesinambungan

Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

3. Prinsip holistik

Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

2.3 Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan, program atau misi) pada suatu organisasi atau sejenisnya ,yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanya (Kurniawan 2005:109).

Sedangkan menurut Abdurahmat (2008:4) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya .Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, tepat waktu dan partisipasi aktif dari

anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.3.1 Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2008:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran – sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dalam perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan – tujuan dengan usaha – usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

- e. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program – program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya dan tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh Karena itu, Pencapaian tujuan akhir semakin terjamin.

2.3.2 Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut Sutrisno (2011:125) ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi, ialah :

- a) Karakteristik organisasi, termasuk struktur dan organisasi
- b) Karakteristik lingkungan internal dan eksternal
- c) Karakteristik karyawan
- d) Kebijakan praktik manajemen

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator efektifitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran suatu target telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.4 Pengertian Musrenbang

Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang merupakan agenda tahunan yang melibatkan warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKP dan RKP-D. Pelaksanaan Musrenbang di Daerah. Dilaksanakan pada tahun yang sedang berjalan adalah dalam rangka penyusunan RKP-D untuk tahun berikutnya, yang diselenggarakan sesuai jadwal sebagai berikut :

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan
dilaksanakan sebelum Musrenbang Kecamatan
- b. Musrenbang Kecamatan
dilaksanakan sebelum Musrenbang Kabupaten/Kota
- c. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota
dilaksanakan sepanjang bulan Maret (sebelum Musrenbang Kab/Kota,
terlebih dahulu diadakan Forum SKPD)
- d. Musrenbang Daerah Propinsi dilaksanakan pada bulan April.

2.4.1 Tahap Perencanaan Pasca-Musrenbang Kab/Kota

1. Penyusunan RKPD;
2. Penusunan Kebijakan Umum, Strategis, dan Plafon APBD;
3. Penyusunan RKA – SKPD;
4. Pembahasan dan Penetapan APBD;
5. Pelaksanaan Program, Monitoring & evaluasi Program.

2.4.2 Tahap Pelaksanaan Pasca-Musrenbang Kab/Kota

1. Penyusunan RKPD;
2. Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemprov untuk Bappeda Provinsi Sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Prov dan Musrenbang Provinsi.
3. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi, dan plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
4. Penyusunan RKA – SKPD oleh SKPD;
5. Pembahasan dan Penetapan APBD;
6. Pelaksanaan Program, Monitoring & evaluasi Program;
7. Perubahan PBD.

2.4.3 Pelaku Utama Kegiatan Pasca-Musrenbang Kab/Kota;

1. Delegasi peserta Musrenbang Kab/Kota;;
2. Bupati/Walikota, para pejabat Pemda (Sekda, Bappeda, SKPD, Badan Pengelola Keuangan Daerah).

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

2.5 Pengertian E-Musrenbang

E-Musrenbang merupakan aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh kementerian perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dengan dikembangkannya e-musrenbang berbasis website ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sinergi perencanaan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance (partisipatif,transparan, efektif, dan efisiensi, serta akuntabilitas).

2.6 Konsep perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kab/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional.

Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

2.6.1 Tujuan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang *Sispenas*

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan mengoptimalkan partisipasi masyarakat
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Pasal 2).

2.6.2 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Menurut undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang SPPN Pasal 8 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan terdiri empat tahapan, yaitu

1. penyusunan rencana
2. pengendalian
3. pelaksanaan rencana
4. evaluasi pelaksanaan rencana

Keempatnya dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membentuk suatu siklus perencanaan yang menyeluruh.

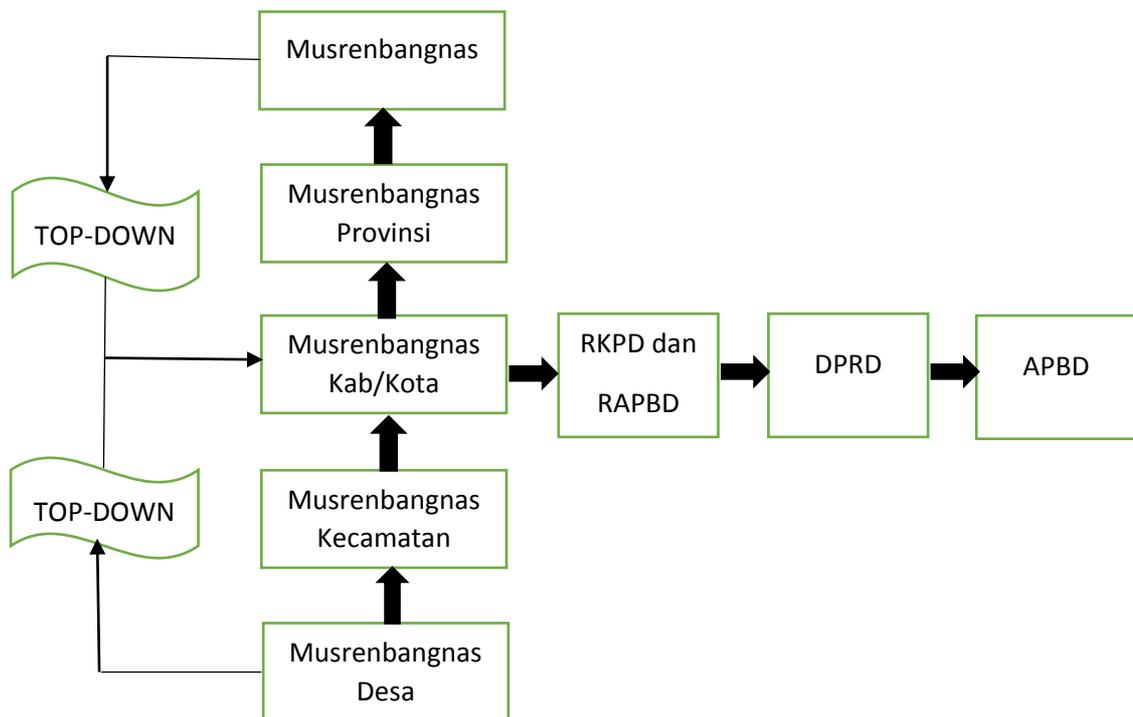
Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam proses perencanaan yaitu:

- a. Pendekatan politik, memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
- b. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- c. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- d. Sedangkan pendekatan atas-bawah/top-down dan bawah-atas/bottom-up, dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah

yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Gambar 2.1

Perencanaan dan Proses Penganggaran Bottom Up



Sumber : dimodifikasi dari Usui dan Alisjahbana (2003) dan kuncoro (2004 bab3)

Berdasarkan tabel diatas, perencanaan pembangunan di Indonesia terdiri dari pendekatan top-down, dan bottom-up, meliputi berbagai jenjang atau tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan berakhir di tingkatan yang tertinggi yaitu Nasional. Tujuan dari proses bottom –up dan top-down adalah untuk menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi. Diatas kertas tampaknya akan menjamin adanya keseimbangan antara prioritas nasional dan aspirasi lokal dalam perencanaan

daerah. Namun kenyataannya di banyak daerah belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi lokal.

2.7 Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Salah satunya adalah pemanfaatan segi teknologi informasi yang berkembang dan dalam rangka pengelolaan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, untuk pengembangan suatu sistem informasi dalam ranah perencanaan pembangunan daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, dirancang suatu system aplikasi yang berbasis elektronik yaitu E-Musrenbang. Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan, Musrenbang merupakan agenda tahunan yang melibatkan warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. E-Musrenbang adalah aplikasi perencanaan berbasis elektronik untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), yang bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan daerah secara transparan, efektif, efisien dan responsive,

serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Aplikasi ini dibangun untuk menyelesaikan masalah tersebut agar dapat diselesaikan dengan mudah, cepat dan tepat.

Perencanaan adalah proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memberikan informasi untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara akurat dan efektif. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan sasaran, bersifat sederhana, mempunyai standar, fleksibel, seimbang, dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dulu. Dan dapat disimpulkan bahwa inti perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang berhasil salah satunya dengan menggunakan pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan dalam melakukan perencanaan dan merasakan manfaatnya secara langsung.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah Provinsi atau pemerintah Kab/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta memperhatikan perkembangan nasional.

Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Dapat dilihat dari Efektivitas Suatu

Organisasi, untuk mengukur Efektivitas tersebut terdiri dari beberapa indikator antara lain :

1. Kejelasan Tujuan Perencanaan
2. Kejelasan Strategi dalam pencapaian tujuan Perencanaan
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana kerja yang memadai
4. Penyusunan Program yang tepat

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas perencanaan pembangunan adalah kejelasan tujuan dalam perencanaan melalui E-Musrenbang, Kejelasan Strategi dalam pencapaian tujuan Perencanaan melalui penggunaan aplikasi E-Musrenbang.tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai agar kemampuan bekerja produktif, dan penyusunan program yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Efektivitas perencanaan pembangunan dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya dan tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh Karena itu, Pencapaian tujuan akhir semakin terjamin.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

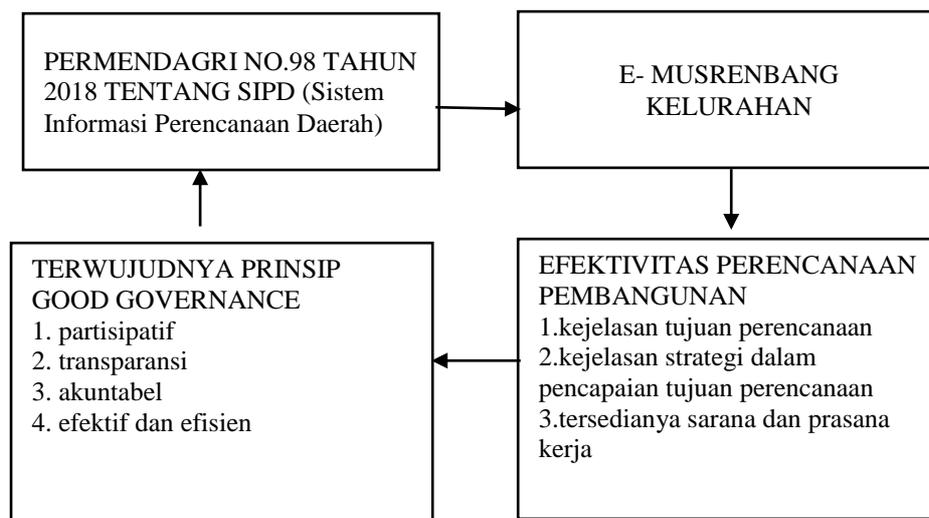
Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. (Arikunto 2010:03). Selain itu, untuk menganalisisnya menggunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana semestinya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang (Maleong 2012:05). Pendekatan ini dapat memberi gambaran realita yang kompleks dalam melihat pemanfaatan E-Musrenbang dalam

Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Tingkat Kelurahan Kota Medan.

3.2 Kerangka konsep



Gambar 3.2 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Jonathan Sarwono (2006:32) konsep merupakan suatu istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Perencanaan pembangunan daerah.

2. Musrenbang

Musyawahar Perencanaan Pembangunan disingkat Musrenbang adalah upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan dan sesuai dengan sarannya, untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa yang telah di jalankan.

4. Perencanaan

Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah dan memilih berbagai alternatif-alternatif untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

5. Perencanaan Pembangunan adalah upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran

arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam Penelitian ini adalah :

KATEGORISASI	INDIKATOR
EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan tujuan perencanaan 2. Tersedianya sarana dan prasana kerja dalam perencanaan 3. Efektivitas dan efisiensi perencanaan
TERWUJUDNYA PRINSIP GOOD GOVERNANCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Transparansi 2. Adanya Partisipasi Masyarakat 3. Adanya Akuntabilitas

3.5 Narasumber/ informan

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang mampu atau mengetahui informasi. Dalam

menentukan narasumber penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu dengan purposive sampling, diambil 7 kelurahan yang mewakili beberapa kecamatan yaitu kecamatan Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Barat, Medan Kota, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Amplas .

Adapun Narasumber yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah :

1. Nama : Taufik Teguh Pribadi S.kom
Usia : 32 tahun
Jabatan : Staff Sub bagian keungan BAPPEDA
2. Nama : Bahagia Ismail Jaya
Usia : 56 tahun
Jabatan : Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar
3. Nama : Muhammad Ilfan S.E
Usia : 40 tahun
Jabatan : Lurah Kelurahan Sei Kera Hilir I
4. Nama : Sahara Harahap, AP
Usia : 47 tahun
Jabatan : Lurah Kelurahan Harjosari 1
5. Nama : Aulia Ahmad S.STP.,M.Si
Usia : 36 Tahun
Jabatan : Lurah Kelurahan Gaharu

6. Nama : Sutrisno S.Sos.
Usia : 54 tahun
Jabatan : Lurah Kelurahan Pulo Brayan Kota
7. Nama : Bangsawan Pasaribu S.E
Usia : 40 tahun
Jabatan : Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir
8. Nama : Abdan Ependi Ritonga S.E
Usia : 36 tahun
Jabatan : Kasi Trantib Kelurahan Denai

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpul data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh informan. Dengan kata lain, wawancara secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber dari data yang tidak langsung memberikan hasil dari data tersebut kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya dari referensi seperti buku, jurnal, media massa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang selaras serta berbagai informasi lainnya yang bersangkutan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas.

3.7 Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan data

Moeloeng (2006 : 247) mengatakan bahwa Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan – satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan.

Sebelum dianalisis data – data peneliti peroleh dalam penelitian terlebih dahulu diklarifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga didapatkan data yang benar – benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian. Tujuannya untuk mempertegas,memperpendek,membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal yang pokok. Data dalam penelitian ini dipisahkan antara data profil informan. Data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

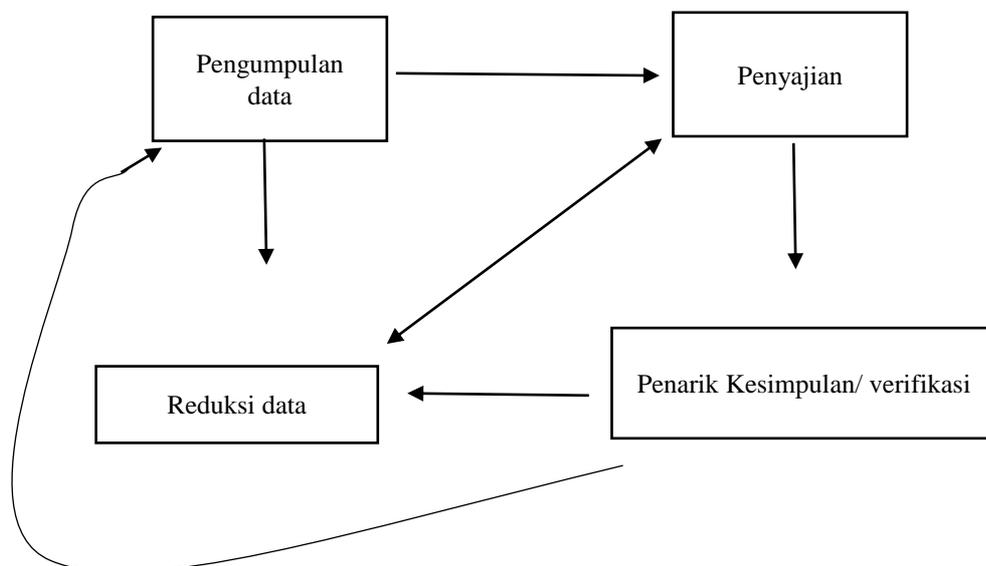
c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk matriks, jaringan, atau bagan

sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola- pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.



Sumber: Miles dan Huberman (2007: 15-20)

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Januari–Maret 2020 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan, Kelurahan Pusat Pasar, Kelurahan Sei Kera Hilir 1, Kelurahan Harjosari I, Kelurahan Gaharu, dan Kelurahan Pulo Brayon Kota.

3.9 Deskripsi lokasi penelitian

Visi, Misi dan Program WaliKota dan Wakil Walikota Medan Terpilih

3.9.1 Visi Pembangunan Kota Medan Tahun 2016-2021

Berdasarkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021 maka visi pembangunan kota tahun 2016-2021 ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagai berikut :

“MENJADI KOTA MASA DEPAN YANG MULTIKULTURAL, BERDAYA SAING, HUMANIS, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS”

Makna utama dan perwujudan visi pembangunan kota tahun 2016-2021 secara substantif dideskripsikan sebagai berikut :

3.9.2 Misi Pembangunan Kota oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan ***“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”*** maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
4. Menyelenggarakan tata ruang Kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas Kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

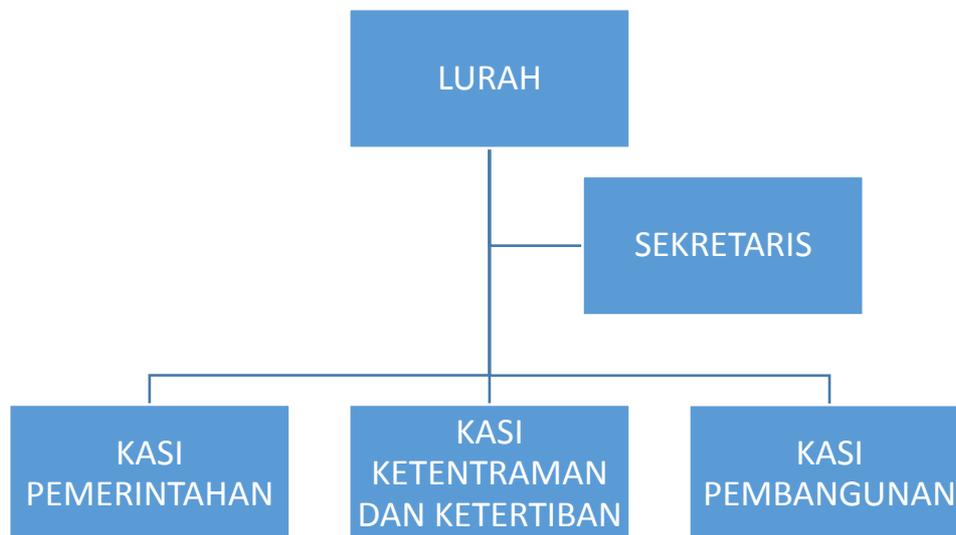
3.9.3 Tugas Pokok dan Fungsi kelurahan

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, pembangunan, dan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kelurahan. Berdasarkan peraturan walikota no. 53 Tahun 2018 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi lurah di lingkungan Pemerintahan Kota Medan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah menyelenggarakan fungsi, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat
- d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.9.4 Struktur Organisasi Kelurahan



Gambar 3.9.4 Struktur Organisasi Kelurahan

Adapun Tugas dan Fungsi Perangkat Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat.
- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kelurahan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup tata pemerintahan.
- d. Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah lingkup pembangunan.

3.9.5 Profil Kelurahan Kota Medan

a. Kelurahan Pusat Pasar

Kelurahan Pusat Pasar Medan merupakan salah satu dari 12 Kelurahan di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang luasnya mencapai 45.1 Ha. Tanah, pemukiman dan perkantoran \pm 36 Ha, Jalan dan fasilitas umum \pm 9.6 Ha. Kelurahan Sidorejo Hilir mempunyai 9 Lingkungan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Pandau Hilir, Sebelah Selatan : Kelurahan Kelurahan Sei Rengas I, Sebelah Barat : Kelurahan Pasar Baru, Sebelah Timur : Kelurahan Pandau Hulu I.

Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 4.634 terdiri dari 1.764 laki-laki, dan 1.811 perempuan. Warga Kelurahan Pusat Pasar Medan terdiri atas beberapa suku bangsa dengan mayoritas suku/Etnis Cina juga suku Jawa, Padang, Aceh, Batak, Karo, bahkan warga negara asing keturunan (Arab, Tamil,) dll.

b. Kelurahan Sidorejo Hilir

Kelurahan Sidorejo Hilir merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung dengan luas wilayah \pm 106 Ha dengan Jumlah penduduk \pm 25,840 jiwa. Kelurahan Sidorejo Hilir mempunyai 14 Lingkungan. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 20.626 terdiri dari 10.256 laki-laki, dan 10.375 perempuan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Indra Kasih, Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Perjuangan , Sebelah Barat : Kelurahan Sidorejo Timur , Sebelah Timur : Kecamatan Percut Sei Tuan.

c. Kelurahan Sei Kera Hilir I

Kelurahan Sei Kera Hilir I merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Sei Kera Hilir I terdiri dari 13 (tiga belas) lingkungan. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 11.084 terdiri dari 5.249 laki-laki, dan 5.835 perempuan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Sidorejo , Sebelah Selatan : Kelurahan Sei Kera Hilir II, Sebelah Barat : Kelurahan Sidorejo Timur, Sebelah Timur : Kelurahan Medan Estate.

d. Kelurahan Denai

Kelurahan Denai merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Denai terdiri dari 9 (sembilan) lingkungan. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 19.547 terdiri dari 9.660 laki-laki, dan 9.887 perempuan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Deli Serdang, Sebelah Selatan : Kelurahan Medan Tenggara, Sebelah Barat : Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Sebelah Timur : PTPN II

e. Kelurahan Harjosari I

Kelurahan Harjosari I merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Harjosari I terdiri dari 14 (empat belas) lingkungan. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 35.247 terdiri

dari 17.288 laki-laki, dan 17.959 perempuan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Harjosari II, Sebelah Selatan : Kelurahan Sitirejo III, Sebelah Barat : Kelurahan Sitirejo II, Sebelah Timur : Kelurahan Amplas.

f. Kelurahan Pulo Brayan Kota

Kelurahan Pulo Brayan Kota merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Barat Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Pulo Brayan Kota terdiri dari 25 (dua puluh lima) lingkungan. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 12.087 terdiri dari 5.975 laki-laki, dan 6.112 perempuan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kantor Camat Medan Barat, Sebelah Selatan : Kelurahan Glugur Kota, Sebelah Barat : Kelurahan Karang Berombak, Sebelah Timur : Kelurahan Pulo Brayan Darat I.

g. Kelurahan Gaharu

Kelurahan Gaharu merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Timur Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Gaharu terdiri dari 12 lingkungan. Dilihat dari data kependudukan jumlah penduduknya 8.064 terdiri dari 4.070 laki-laki, dan 10.375 perempuan. Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kelurahan Durian, Sebelah Selatan : Kelurahan Kesawan, Sebelah Barat : Kelurahan Silalas, Sebelah Timur : Kelurahan Sidorame Barat I.

Berikut tabel Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin dari beberapa kelurahan di Kota Medan antara lain yaitu Kelurahan Pusat Pasar, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kelurahan Sei Kera Hilir 1, Kelurahan Denai, Kelurahan Harjosari 1, Kelurahan Pulo Brayan Kota, dan Kelurahan Gaharu.

Tabel 3.9.5 Jumlah penduduk kelurahan di Kota Medan

NO	Nama Kelurahan	Nama Lurah	Jumlah Penduduk	
			Laki-laki	Perempuan
1	Kelurahan Pusat Pasar	H. Amri Parinduri S.H	1.764	1.811
2	Kelurahan Sidorejo Hilir	Yurian Fahmi S.STP. M.AP	10.256	10.375
3	Kelurahan Sei Kera Hilir 1	Muhammad Ilfan S.E	5.249	5.835
4	Kelurahan Denai	Drs. A Muhzi	9.660	9.887
5	Kelurahan Harjosari 1	Sahara Harahap, AP	17.288	17.959
6	Kelurahan Pulo Brayan Kota	Sutrisno S.Sos	5.975	6.112
7	Kelurahan Gaharu	Aulia Ahmad S.STP., M.SI	3.995	4.070

Sumber : BPS Kota Medan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data saat wawancara dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu memperoleh data dengan wawancara langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini berfokus pada beberapa lokasi penelitian dengan narasumber yaitu Staff Sub Bagian Keuangan BAPPEDA Kota Medan, Lurah Pulo Brayon Kota, Lurah Sei Kera Hilir 1, Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar, Kasi Pembangunan Kelurahan Denai, Lurah Gaharu, Lurah Kelurahan Harjosari 1. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan, sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis kelamin

Distribusi Nnrasumber berdasarkan jenis kelamin di kelompokkan menjadi dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Table 4.1.1
Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	7	90%
2	Perempuan	1	10%
	Jumlah	8	100%

Berdasarkan table 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 7 orang dengan presentase 90% sedangkan 1 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi 1 atau 10%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Table 4.1.2
Distribusi narasumber berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	30-39	3	40%
2	40-49	3	40%
3	50-59	2	20%
	Jumlah	8	100%

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 30-39 tahun dan umur 40-49 tahun seimbang dengan frekuensi 3 orang atau 40%. Sedangkan narasumber 50-59 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 20%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.1.3
Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	S2	1	10%
2	S1	6	80%
3	SMA	1	10 %
	Jumlah	8	100%

Berdasarkan table 4.1.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber pendidikan S1 dengan frekuensi 6 orang atau 80%. Sedangkan narasumber pendidikan S2 dan SMA masing-masing dengan frekuensi 1 orang atau 10%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Kejelasan tujuan perencanaan E-Musrenbang

Kejelasan tujuan perencanaan E-Musrenbang adalah dipahaminya proses pelaksanaan oleh implementator yang meliputi a) tahapan proses kegiatan musrenbang, b) penyusunan perencanaan usulan melalui rembuk warga, c) membuat usulan prioritas, d) menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan musrenbang, e) melaksanakan tujuan yang tepat sasaran dan terarah. Kemudian

memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi dan sesuai dengan harapan mereka, cara untuk memenuhi tujuan tersebut yaitu mencapai kondisi akhir yang di inginkan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat penerima benar-benar telah terpenuhi. Pemerintah kelurahan setelah melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyusunan apa yang akan dilakukan, pada proses ini merupakan proses membuat keputusan yang lebih utuh dari perencanaan awal, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan terhadap pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan pada Tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa para pelaksana belum sepenuhnya mengerti dalam membuat usulan sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memfasilitasi dilakukannya pelatihan yang dilaksanakan sebelum kegiatan musrenbang dilaksanakan di kelurahan, alur kegiatannya musrenbang kelurahan mengundang stakeholder yang di hadiri oleh lurah, kepala lingkungan, organisasi masyarakat, LPM, Bintara Pembina Desa (babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkantibmas), tokoh masyarakat, perwakilan dari kecamatan. Musrenbang termasuk kedalam pendekatan bottom up Tahapan pelaksanaannya dimulai dari bulan Desember sampai Januari rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di bulan Januari hingga April dilakukan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kab/Kota melalui surat edaran sekda (sekretaris

daerah) untuk memberitahu jadwal pelaksanaan musrenbang di setiap kelurahan dan kecamatan yang alurnya di mulai dari rembuk warga, musrenbang kelurahan, kecamatan, dan musrenbang kota/kabupaten, Hasil musrenbang kota dibawa ke tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dari hasil nasional RKP (rencana kerja pemerintah) yang diacu provinsi, Provinsi membuat rancangan awal. BAPPEDA hanya membuat rencana kerja perangkat daerah) sedangkan tahapan setelah adanya musrenbang yaitu, KUA PPAS, APBD final nya proses nya hingga pengesahan di DPRD hingga Desember.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo Brayan Kota Pada Tanggal 5 februari 2020, mengatakan bahwa tujuan dari perencanaan e-musrenbang sudah dipahami dengan jelas melalui pelaksanaan pertama kegiatan E-Musrenbang kelurahan di minta untuk mengirimkan operator untuk melakukan pelatihan yang di buat oleh BAPPEDA, dari hasil pelatihan itu operator sudah ditentukan waktu dilaksanakannya rembuk warga, ketika rembuk warga harus ada dokumentasi seperti foto dan video bersama masyarakat dan dimasukan ke sistem operator kelurahan. Kemudian, usulan masuk ketingkat kelurahan, di kelurahan memilih prioritas sebanyak 10 usulan, sedangkan melalui rembuk warga sebanyak 20 usulan setiap kelurahan yang ditentukan dari sejumlah lingkungan yang ada. Kemudian dari kecamatan memverifikasi usulan prioritas di Kota Medan. Dari tingkat kecamatan usulan akan di musrenbangkan tingkat Kota Medan. Prioritas yang di kecamatan sesuai dengan kemampuan anggaran. Sebetulnya dengan adanya E-Musrenbang tidak perlu adanya musrenbang kelurahan lagi sudah bisa, sedangkan untuk tepat sasaran dan terarah

nya masih jauh dari harapan. Musrenbang ini dilaksanakan hasil dari keinginan masyarakat, tetapi masyarakat tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah Kota Medan dari yang di usulkan, hasil rembuk warga kurang lebih ada sekitar 1000 usulan sementara anggaran pemerintah Kota Medan untuk membangun tidak bisa melaksanakan semua usulan. Kendalanya keterbatasan anggaran di Kota Medan dan kurang kesadaran masyarakat untuk membayar PBB karna dari PBB bisa membantu membangun yang di inginkan masyarakat.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilfan S.E selaku Lurah Sei Kera Hilir 1 Pada Tanggal 7 Februari 2020, mengatakan bahwa E-Musrenbang secara tujuannya sudah terarah dan teratur juga dapat dipertanggung jawabkan karena yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan musrenbang Kota Medan yang nantinya akan menjadi hasil musrenbang pusat. Aplikasinya di lapangan harus tebang pilih karna dana kelurahan tidak besar mana yang prioritas dari kelurahan yang dilaksanakan, E-Musrenbang sudah lebih bagus secara data, tetapi semakin menyentuh dengan masyarakat maka keinginan masyarakat harus terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahagia Ismail Jaya selaku Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar pada tanggal 10 Februari 2020, mengatakan bahwa tujuan yang direncanakan sudah dipahami, tetapi persoalannya kepala lingkungan tidak semua yang melek teknologi, karena pelatihan yang diadakan tidak sampai kepada kepala lingkungan dan perencanaan dari bawah keatas tidak semua tertampung karena ada ribuan usulan, tujuan perencanaannya belum tepat sasaran karena apa yang sangat dibutuhkan masyarakat tidak bisa di

anggarkan contohnya karang taruna membutuhkan alat kesenian tapi tidak bisa diusulkan, contoh lain kesehatan masyarakat posyandu alat kesehatan penunjang yang dibutuhkan seperti timbangan posyandu, walaupun ada E-Musrenbang tetapi tidak semua bisa terlaksana. hasilnya dari tingkat bawah kepling hanya mengumpulkan dari lingkungan masing-masing. kemudian masyarakat tidak tahu semua tidak dapat ditampung di E-Musrenbang, sebenarnya E-musrenbang ini sudah bagus kalau benar-bener dilaksanakan.

Sama halnya juga dengan yang dikatakan Bapak Bangsawan Pasaribu S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir Pada Tanggal 10 Februari 2020, mengatakan bahwa E-Musrenbang sudah tepat sasaran dan terarah karena mengusulkan yang dibutuhkan masyarakat atau dengan kata lain perpanjangan tangan masyarakat ke pemko, dan memang dari masyarakat untuk masyarakat tetapi dibatasi karena banyak yang mengusulkan.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Abdan Ependi Ritonga S.E selaku Kasi Trantib Kelurahan Denai pada tanggal 11 Februari 2020, mengatakan bahwa yang di usulkan melalui E-Musrenbang masih belum tepat sasaran, intinya aplikasi ini ada atau tidak masyarakat antipati karena apa yang diusulkan belum tentu terealisasi. Misalnya mengusulkan yang terkait ekonomi, sosial dan budaya kalau di janjikan kepada warga tidak bisa ditentukan akan terealisasi. Selain itu, kemudahannya karena ada dana kelurahan usulan bisa dikerjakan langsung dengan anggarannya. Dana kelurahan juga tidak harus diusulkan melalui musrenbang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aulia Ahmad S.STP,M.Si selaku Lurah Kelurahan Gaharu Pada Tanggal 11 Februari 2020, mengatakan bahwa sudah tepat sasaran, tapi pelaksanaannya bertahap tidak semua di tampung di lingkungan kalau tidak terealisasi tahun ini bisa diusulkan tahun depannya, Namun dengan adanya E-musrenbang usulan yang ditampung oleh kelurahan tidak semua bisa di realisasikan dengan keterbatasan anggaran yang di miliki pemerintah Kota Medan. Tetapi usulan tersebut juga bisa di usulkan kembali untuk tahun kedepannya.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Sahara Harahap, AP selaku Lurah Harjosari I Pada Tanggal 12 Februari 2020, mengatakan bahwa perencanaan yang di buat sudah tepat saran, tetapi usulan-usulan yang dimasukan ke aplikasi E-Musrenbang tidak semua di realisasikan, usulan yang dipilih hanya yang prioritas karena tidak dapat dijalankan semua dengan keterbatasan dana APBD, kebanyakan yang di usulkan itu di bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembetonan dinding parit, kalau pelatihan atau sosialisasi menggunakan dana kelurahan. Perbedaan ketika masih manual dengan sekarang menggunakan aplikasi tidak ada bedanya, hanya sekarang mulai 2019 dana kelurahan, sebelumnya adanya E-Musrenbang semua usulan belum bisa tercapai hanya 2 atau 3 lingkungan saja yang tercapai, usulan yang dimasukan ke aplikasi harus di dokumentasikan kalau tidak di foto usulan tidak akan terverifikasi, yang membedakan usulan-usulan dulu dan sekarang itu bisa di lihat dengan terbuka menggunakan dokumentasi ketika rembuk warga, sebelum adanya E-Musrenbang

tidak ada rembuk warga hanya di bagikan kertas kepling mencatat usulan yang paling prioritas kemudian di rekap dan membuat makalah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas simpulkan bahwa dalam E-Musrenbang banyak keterbatasannya, para pelaksana sudah mengerti dengan tujuan perencanaan walaupun ada beberapa yang tidak melek teknologi karena faktor usia, tidak semua kepala lingkungan bisa menggunakan aplikasi E-Musrenbang mereka hanya mengumpulkan usulan saja dari rembuk warga lalu diserahkan kepada operator untuk dimasukkan ke aplikasi, kemudian tidak semua usulan-usulan bisa dimasukkan karena keterbatasan anggaran pemko Medan dan masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk membayar PBB. Selain itu usulan yang di masukkan ke aplikasi E-Musrenbang tidak ada mata anggarannya tidak bisa menampung yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian permasalahan lainnya di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka tidak konsisten, mereka terima usulan tapi tidak mereka laksanakan karena ada proyek-proyek titipan, OPD punya perencanaan sendiri dari tingkat OPD dan lebih mengutamakan itu daripada usulan ditingkat bawah.

b. Tersedianya sarana prasarana dalam E-Musrenbang

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak atau mudah untuk dipindahkan seperti komputer, dan yang lainnya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana

itu ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan dan Bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo pada Tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa sarana dan prasarana sudah cukup karna tidak membutuhkan alokasi anggaran yang besar hanya butuh satu laptop dan isi paket data saja, selain itu, menggunakan smartphone juga bisa.

Kemudian Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ilfan S.E selaku Lurah Sei Kera Hilir 1 dan bapak Bahagia Ismail Jaya selaku Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar pada tanggal 10 Februari 2020 2020, mengatakan bahwa untuk saat ini sarana dan prasarananya sudah cukup baik, Tetapi pelatihan kepada operator harus lebih tepat dan jelas. Setiap kepling uploadnya bisa menggunakan smartphone, kalau kepling tidak bisa mengupload bisa dibantu oleh operator dikelurahan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara Pada Tanggal 11 Februari 2020 dengan Bapak Aulia Ahmad S.STP.,M.Si selaku Lurah Kelurahan Gaharu ,Bapak Abdan Ependi Ritonga S.E selaku Kasi Trantib Kelurahan Denai, Bapak Bangsawan Pasaribu S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir, dan Ibu Sahara Harahap, AP selaku Lurah Harjosari I mengatakan bahwa,sarana prasanana E-Musrenbang hanya dengan jaringan internet dan komputer.

Berdasarkan wawancara diatas disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Pulo Brayan Kota, Kelurahan Sei Kera Hilir 1, Kelurahan Sidorejo Hilir , Kelurahan Pusat Pasar, Kelurahan Gaharu, Kelurahan Denai dan Kelurahan Harjosari 1 dalam menundukung terlaksananya E-Musrenbang sebagian besar sudah terpenuhi walaupun dari beberapa kelurahan masih merasa kurang, dan sejauh ini tidak ada kesulitan bahkan dengan menggunakan smartpone juga bisa hanya membutuhkan username dan password untuk login ke aplikasi E-Musrenbang.

c. Efektivitas dan efisiensi perencanaan bottom-up E-Musrenbang

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya dan tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh Karena itu, Pencapaian tujuan terarah dan tepat sasaran semakin terjamin. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan pada Tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa sudah efektif karena dengan menggunakan aplikasi E-musrenbang kelurahan sudah sesuai dengan tahapan dan prosedur. Kalau Efisien sudah karna tidak membutuhkan dana yang besar.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo Brayan Kota Pada Tanggal 5 februari 2020, mengatakan bahwa lebih tersistem

dengan baik, sudah efektif proses dari bawah ke atas dikelurahan tidak ada masalah, tapi harapannya kepada masyarakat usulan itu bisa dipenuhi. Sebetulnya prosesnya lebih cepat di E-Musrenbang daripada yang manual karena langsung terlihat ke BAPPEDA dan OPD terkait, kalau dulu berjenjang perencanaannya. Sekarang sudah bisa dibuka langsung oleh OPD tidak perlu menunggu musrenbang Kota. Permasalahannya keinginan masyarakat tidak bisa terpenuhi semuanya dilihat dari anggaran yang ada di Kota Medan kalau mencukupi bisa direalisasi, tetapi usulan yang tidak terealisasi bisa diulang kembali.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilfan S.E selaku Lurah Sei Kera Hilir 1, Bapak Bahagia Ismail Jaya selaku Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar dan Bapak Bangsawan Pasaribu S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir pada tanggal 10 Februari 2020, mengatakan bahwa sudah cukup efektif, jadi kembali lagi pada sudut pandangnya, kalau ditanya dari sudut pandang masyarakat tidak efektif karena usulan mereka banyak yang tidak di terima di aplikasi tidak bisa dimasukkan. Kalau dari kelurahan sudah efektif karna memudahkan yang direncanakan sudah tertata, sudah tertulis, sudah ada dokumentasinya, kalau untuk masyarakat tidak efektif hanya untuk masalah sepele harus menunggu satu tahun.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Abdan Ependi Ritonga S.E selaku Kasi Trantib Kelurahan Denai pada tanggal 11 Februari 2020, mengatakan bahwa apa yang sudah di usulkan belum tentu terrealisasikan, sehingga masyarakat menuntut kalau tidak dikerjakan yang diusulkan tidak mau berpartisipasi. Karena sudah setiap tahun di usulkan tidak di realisasikan

akibatnya warga antipati dengan pemko Medan. Musrenbang hanya formalitas saja, karna mengundang masyarakat juga disini sudah sulit, kami hanya mengikuti alur BAPPEDA, tetapi BAPPEDA juga tidak bisa mengendalikan yang diusulkan dan BAPPEDA juga tidak bisa memerintahkan ke OPD, selain itu anggarannya juga kalau di anggarkan uang tersebut belum tentu masuk ke kelurahan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Pada Tanggal 11 Februari 2020 dengan Bapak Aulia Ahmad S.STP.,M.Si selaku Lurah Kelurahan Gaharu dan Ibu Sahara Harahap, AP selaku Lurah Harjosari I mengatakan bahwa sudah efektif melalui aplikasi jadi input data dan dikirim bisa dilihat OPD dan BAPPEDA, sebelumnya membuat makalah, sekarang juga ada makalah tapi usulan-usulan lebih tersusun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan dilihat dari sudut pandang para pelaksana kegiatan sudah efektif, karena melalui aplikasi E-musrenbang sudah sesuai dengan tahapan dan tata cara, tidak keluar dari tahapan dan cara tersebut. Selain itu juga memudahkan yang direncanakan sudah tertata, sudah tersusun, sudah ada dokumentasinya. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat perencanaan yang dibuat melalui E-Musrenbang masih belum efektif karena yang di usulkan belum tentu di realisasikan. Kemudian keterbatasan anggaran membuat usulan masyarakat tidak bisa semua di realisasikan.

d. Adanya transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad taufik teguh pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan Tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa sudah sangat transparan karna masyarakat bisa melihat di web E-Planning Kota Medan, kemudian agar warga bisa melihat hasil dari musrenbang tugas kepling untuk mensosialisasikan.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo Brayon Kota Pada Tanggal 5 februari 2020, mengatakan bahwa sudah transparan. Usulan lebih jelas dan mengulang usulan yang tidak terealisasi juga bisa, usulan-usulan yang dimasukan seperti jalan, drainase, ekonomi sosial budaya.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilfan S.E selaku Lurah Sei Kera Hilir 1 Pada Tanggal 7 Februari 2020, mengatakan bahwa sangat transparan bisa dilihat usulan-usulannya sosialisasi juga dilakukan oleh pemerintah tapi tergantung masyarakatnya merespon atau tidak, dan disadari juga di kelurahan mengakui sosialisasinya kurang.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Bahagia Ismail Jaya selaku Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar pada tanggal 10 Februari 2020, mengatakan bahwa sudah sangat transparan, masyarakat bisa melihat, bisa diakses dengan username dan password, namun ada kekecewaan dari tingkat kelurahan

karena usulan-usulan yang diverifikasi pada aplikasi bisa secara jelas melihat di terima atau ditolak.

Sama halnya juga dengan yang dikatakan Bapak Aulia Ahmad S.STP.,M.Si selaku Lurah Kelurahan Gaharu, Bapak Bangsawan Pasaribu S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir, Bapak Abdan Ependi Ritonga S.E selaku Kasi Trantib Kelurahan Denai, dan Ibu Sahara Harahap, AP selaku Lurah Harjosari I Pada Tanggal 10 Februari 2020, yang mengatakan bahwa sudah transparan mengundang tokoh masyarakat tidak semua yang tau, melalui perwakilan saja seperti tokoh pemuda karang taruna, pengurus PKK. Dan juga tidak bisa mengusulkan sesuka kita, harus ada foto yang dimusyawarahkan bersama warga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa penggunaan aplikasi E-Musrenbang sudah transparan, karena usulan-usulan yang diusulkan melalui rembuk warga dapat dilihat oleh masyarakat melalui situs web e-planning. Selain itu, tidak sesuka hati memasukan usulan karena usulan yang diupload harus menggunakan dokumentasi yang di musyawarahkan bersama warga.

e. Adanya Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan pada tanggal 5 Februari 2020, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat bagus tahun ini sudah masuk 6.700an usulan dan sudah paham menentukan skala prioritas perencanaan yang dimasukan. Sebelum adanya E-Musrenbang ini masyarakat sekedar datang, kalau sekarang lebih terarah, dan langsung tau usulan ditolak kemudian bisa langsung berdiskusi, warga boleh datang tetapi kadang warga tidak punya waktu untuk datang karena ada aktivitas lain.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo Brayan Kota dan Bapak Muhammad Ilfan S.E selaku Lurah Sei Kera Hilir 1 Pada Tanggal 5 februari 2020, mengatakan bahwa jadi musrenbang di sini partisipasi masyarakatnya sudah lumayan banyak yang menghadiri musrenbang itu kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, kalau dari masyarakat tidak semua bisa datang karena punya kegiatan masing-masing.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Bahagia Ismail Jaya selaku Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar pada tanggal 10 Februari 2020, mengatakan bahwa partisipasinya terbagi dua, kepada culture perkotaan partisipasinya kurang, tapi kalau dipinggiran tingkat partisipasi luar biasa.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Bangsawan Pasaribu S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir, Bapak Abdan Ependi

Ritonga S.E selaku Kasi Trantib, Bapak Aulia Ahmad S.STP.,M.Si selaku Lurah Kelurahan Gaharu,dan Ibu Sahara Harahap, AP selaku Lurah Harjosari I Pada Tanggal 10 Februari 2020, mengatakan bahwa partisipasinya banyak yang datang seperti tokoh masyarakat, bhabinsa, kepala lingkungan. Tetapi yang hadir dibatasi tetapi mereka mengetahui ada musrenbang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat bagus dulu sebelum adanya e-musrenbang masyarakat tidak dilibatkan kalau sekarang lebih terarah, warga boleh datang mengikuti musrenbang tetapi kadang warga punya aktivitas sehingga masyarakat tidak memiliki waktu yang banyak untuk ikut terlibat langsung pada kegiatan Musrenbang. karena faktor budaya perkotaan partisipasinya kurang, tapi kalau dipinggiran tingkat partisipasi luar biasa. Jadi yang menghadiri musrenbang kelurahan perwakilan-perwakilan saja seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, karang taruna, LPM dan stakeholder terkait.

f. Adanya akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Teguh Pribadi S.kom Selaku Staff Sub Bidang Keuangan BAPPEDA Kota Medan pada Rabu, 5 Februari 2020, mengatakan bahwa akuntabilitasnya sejauh ini

dengan verifikasi berjenjang sampai dengan tingkat BAPPEDA, semua usulan yang diterima tidak bisa dipastikan terlaksana. Karena siklus nya ada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, ada pertanggung jawaban.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sutrisno S.Sos selaku Lurah Pulo Brayon Kota Pada Tanggal 5 februari 2020, mengatakan bahwa kita hanya mempertanggung jawabkan sebatas usulan yang masuk ke kelurahan, untuk pertanggung jawaba dalam merealisasikan nya itu kepada OPD terkait.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilfan S.E selaku Lurah Sei Kera Hilir 1, Bapak Bahagia Ismail Jaya selaku Sekretaris LPM Kelurahan Pusat Pasar dan Bapak Bangsawan Pasaribu S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sidorejo Hilir pada tanggal 10 Februari 2020, mengatakan bahwa sangat bisa dipertanggung jawabkan, dan bisa diikuti, untuk merealisasikan itu kepada para pengambil keputusan atau dinas terkait.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Abdan Ependi Ritonga S.E selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Denai pada tanggal 11 Februari 2020, mengatakan bahwa tidak bisa sejauh itu kalau dari kelurahan hanya mengusulkan hasil dari kelurahan masuk ke kecamatan lalu dipertanggung jawabkan di tingkat Kota. Kalau dana kelurahan bisa dipertanggung jawabkan misalnya ada pengaspalan jalan dengan anggaran 40 juta menggunakan dana kelurahan itu tidak perlu menunggu dari musrenbang kota.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara Pada Tanggal 11 Februari 2020 dengan Bapak Aulia Ahmad S.STP,M.Si selaku Lurah Kelurahan Gaharu dan Ibu Sahara Harahap, AP selaku Lurah mengatakan bahwa karna ini sistem aplikasi pertanggung jawabannya secara online, kalau untuk dipertanggung jawabkan itu kepihak OPD nya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas perencanaan bottom-up E-Musrenbang yang ada dikelurahan hanya sebatas mengumpulkan usulan-usulan dari rembuk warga untuk dibahas di musrenbang kecamatan, lalu di musrenbangkan tingkat Kota dipilih yang akan diprioritaskan, yang akan di laksanakan kepada OPD terkait.

4.2.2 Analisis Hasil Wawancara

a. Kejelasan tujuan dalam perencanaan E-Musrenbang

Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan perencanaan E-Musrenbang adalah diketahui dan dimengertinya keseluruhan proses pelaksanaan E-Musrenbang secara tepat sasaran dan terarah yaitu ; a) tahapan proses kegiatan musrenbang, b) penyusunan perencanaan usulan melalui rembuk warga, c) membuat usulan prioritas, d) menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan musrenbang, e) melaksanakan tujuan yang tepat sasaran dan terarah. Kemudian memastikan bahwa kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat terpenuhi dan sesuai dengan harapan mereka, cara untuk memenuhi tujuan tersebut yaitu mencapai kondisi akhir yang di inginkan dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat penerima benar-benar telah terpenuhi. Pemerintah kelurahan setelah melakukan

penyelidikan, kemudian dilakukan penyusunan apa yang akan dilakukan, pada proses ini merupakan proses membuat keputusan yang lebih utuh dari perencanaan awal, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kecamatan yang akan diajukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan terhadap pembangunan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para implementator sudah mengerti dengan tahapan penyusunan perencanaan karena di bekali pelatihan dari BAPPEDA, selain itu persoalan lain, ada beberapa kepala lingkungan yang masih belum mahir teknologi, tidak semua kepala lingkungan bisa menggunakan aplikasi E-Musrenbang seperti kepling di kelurahan Sei Kera Hilir 1, kelurahan Denai dan kelurahan Sidorejo Hilir dikarenakan faktor usia, sehingga kepling hanya mengumpulkan usulan saja dari rembuk warga lalu diserahkan kepada operator untuk dimasukkan ke aplikasi. Kemudian untuk menentukan usulan prioritas setiap kelurahan hanya dibatasi 20 usulan dari rembuk warga dan 10 usulan prioritas kelurahan. Selain itu dalam mencapai tujuan perencanaan masih belum tepat sasaran dan terarah, karena dalam E-Musrenbang masih banyak keterbatasannya, tidak semua usulan-usulan bisa dimasukkan karena keterbatasan anggaran pemko Medan. Selain itu usulan yang di masukkan ke aplikasi E-Musrenbang tidak ada mata anggarannya dan tidak bisa menampung yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian permasalahan lainnya di tingkat OPD tidak konsisten, menerima usulan tapi

tidak di laksanakan karena ada proyek-proyek titipan, OPD punya perencanaan sendiri dari tingkat OPD, kadang mereka lebih mengutamakan itu daripada usulan ditingkat bawah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pelakasa sudah paham dengan tahapan penyusunan perencanaan yang dilakukan namun dalam membuat usulan yang prioritas belum tepat sasaran karena E-Musrenbang masih banyak keterbatasannya, tidak semua usulan-usulan bisa dimasukkan karena keterbatasan anggaran pemko Medan. Selain itu usulan yang di masukkan ke aplikasi E-Musrenbang tidak ada mata anggarannya dan tidak bisa menampung yang dibutuhkan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan Stephen Robbins dan Mary Coulter (2010) mengemukakan banyak tujuan perencanaan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahannya baik untuk manajer maupun karyawan non manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, organisasi dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efisien. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih

efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam organisasi. Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau *evaluating* adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja organisasi.

b. Tersedianya sarana prasarana dalam E-Musrenbang

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dengan kata lain sarana lebih ditunjukkan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak atau mudah untuk dipindahkan seperti komputer, dan yang lainnya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan kata lain prasarana itu ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruangan dan lapangan.

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sebagian besar kelurahan sudah memadai seperti di kelurahan Pulo Brayan Kota, Kelurahan Sei Kera Hilir 1, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kelurahan Pusat Pasar, Namun dari sebagian kelurahan lagi masih belum memadai karena belum disediakan dari anggaran kecamatan seperti Kelurahan Gaharu, Kelurahan Denai dan Kelurahan Harjosari 1 kemudian sejauh ini tidak ada kesulitan bahkan dengan menggunakan

smartphone juga bisa hanya membutuhkan username dan password untuk login ke aplikasi E-Musrenbang. Berikut tabel jumlah unit sarana yang tersedia di beberapa kelurahan di Kota Medan.

Table 4.2.2 Sarana Prasarana Kelurahan

NO	Nama Kelurahan	Unit	
1	Kelurahan Pusat Pasar	2 Komputer	Wifi 10 Mbps
2	Kelurahan Pulo Brayan Kota	2 Komputer	Wifi 10 Mbps
3	Kelurahan Sei Kera Hilir 1	2 Komputer	Wifi 10 Mbps
4	Kelurahan Sidorejo Hilir	2 Komputer	Wifi 10 Mbps
5	Kelurahan Denai	1 Komputer	Wifi 10 Mbps
6	Kelurah Harjosari 1	1 komputer	Wifi 10 Mbps
7	Kelurahan Gaharu	1 komputer	Wifi 10 Mbps

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan E-Musrenbang di kelurahan sudah memiliki sarana dan prasarana sehingga perencanaan dapat berjalan secara efektif. Adapun sarana dan prasarana

untuk mendukung pelaksanaan E-Musrenbang di kelurahan Kota Medan terdiri dari computer dan jaringan internet saja, bahkan bisa dengan menggunakan smartphone lebih memudahkan penginputan usulan. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang ada di setiap kelurahan Pusat Pasar, Pulo Brayan Kota, Sei Kera Hilir 1, Harjosari 1, Denai Sidorejo Hilir, dan Gaharu sudah mendukung dalam meningkatkan efektivitas perencanaan yang ada di setiap kelurahan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan Moenir (2000:191) menyatakan bahwa pengertian sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari pengertian sarana yg di katakan Moenir tersebut jelas memberi petunjuk sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu atau juga peralatan utama, dan kedua alat tersebut berfungsi untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin di capai.

c. Efektivitas dan efisiensi perencanaan bottom-up E-Musrenbang

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya dan tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh Karena itu, Pencapaian tujuan terarah dan tepat sasaran akhir semakin terjamin. Pelaksanaan yang efektif dan

efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dilihat dari sudut pandang para pelaksana kegiatan sudah efektif, karena melalui aplikasi E-musrenbang sudah sesuai dengan tahapan dan tata cara, tidak menyimpang dari tahapan dan cara tersebut. Selain itu juga memudahkan yang direncanakan sudah tertata, sudah tersusun, dan menggunakan dokumentasinya. Keberadaan E-Musrenbang juga dinilai mampu memotong proses-proses panjang penjarangan usulan pembangunan di masyarakat agar usulan yang masuk lebih tepat, terarah dan akurat. Sistem E- Musrenbang ini mampu dijadikan sebuah pelajaran penting bagi perencanaan pembangunan berparadigma masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya dijadikan objek melainkan subjek pembangunan.

Dengan demikian efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nugroho, 2003) bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, dalam penelitian ini di fokuskan pada satu tahapan dari pembangunan yaitu perencanaan pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang signifikan menentukan suatu proses pembangunan. Perencanaan adalah proses berkelanjutan, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada

dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi.

d. Adanya transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Maka dengan itu pemerintah Kota Medan membuat sistem perencanaan berbasis elektronik agar masyarakat bisa melihat perencanaan yang dibuat bisa mengakses situs web E-Planning semua usulan yang sudah di terima melalui Kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam hal transparansi, ada sisi positif dimana usulan- usulan yang disetujui oleh pemerintah pun dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengawal proses pembangunan di daerahnya. Sisi positif lain dari E- Musrenbang antara lain, mampu menjamin keakuratan data rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, mampu memastikan ketepatan sasaran kegiatan, mampu mempermudah pengelompokan jenis usulan pekerjaan, lebih mudah memperkirakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan atas usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dengan cepat dan tepat. Dengan demikian e-musrenbang sudah transparan karena perencanaan dapat dilihat dan terbuka untuk masyarakat.

Sebagaimana yang di kemukakan Hari Sabarno (2007) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik

mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

e. Adanya Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, karena proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik. Partisipasi dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan mengundang perwakilan-perwakilan saja seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, karang taruna, LPM dan stakeholder terkait.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penjangkaran aspirasi, peluang untuk menyampaikan aspirasi belum sepenuhnya diberikan secara luas kepada masyarakat. Aspirasi atau usulan hanya diberikan kepada beberapa pihak saja dalam hal ini elite di tingkat lingkungan dan Kelurahan, kehadiran masyarakat pada penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan kecamatan masih menunjukkan tingkat kehadiran yang rendah. Tingkat kehadiran masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, namun khusus bagi masyarakat perkotaan faktor yang paling dominan memengaruhi tingkat kehadiran masyarakat adalah rutinitas masyarakat yang tergolong cukup padat. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki waktu yang banyak untuk ikut terlibat langsung pada kegiatan Musrenbang. Keterwakilan

masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan belum sepenuhnya menghadirkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian partisipasi hanya melibatkan perwakilan-perwakilan saja seperti kepala lingkungan, tokoh masyarakat, pengurus PKK, karang taruna, LPM dan stakeholder terkait dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan (Suratman, 2008), Perencanaan partisipatif merupakan salah satu proses pembelajaran yang penting bagi masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua *stakeholder* dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.

f. Adanya akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini akuntabilitas yang dilakukan oleh perangkat kelurahan di musrenbang kelurahan memilih prioritas usulan yang akan di bahas di musrenbang kecamatan untuk implementasi nya dijalankan oleh OPD terkait.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas perencanaan bottom-up E-Musrenbang yang ada di kelurahan hanya

sebatas mengumpulkan usulan-usulan dari rembuk warga untuk dibahas di musrenbang kecamatan, lalu di musrenbangkan tingkat kota dipilih yang akan diprioritaskan, nantinya setelah disahkan akan di laksanakan kepada OPD terkait. Dengan demikian akuntabilitas dalam pelaksanaan musrenbang dilakukan berjenjang mulai dari rembuk warga yang melibatkan masyarakat, penentuan prioritas usulan melalui kecamatan, kelurahan dan tingkat kota. sedangkan tahapan setelah adanya musrenbang yaitu, KUA PPAS, APBD final nya hingga pengesahan di DPRD sampai bulan Desember.

Sebagaimana yang dikemukakan Taliziduhu Ndraha (2000) konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggung jawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya.

Dengan demikian E-Musrenbang kelurahan belum efektif dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di kota medan karena masih banyak keterbatasan dalam merealisasikan usulan dan dokumen perencanaan yang disusun cenderung masih berupa susunan usulan semata, program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran

Pemerintah Kota, dan sulit untuk memastikan adanya konsistensi antara program/kegiatan SKPD, Kelurahan dan Kecamatan serta kebutuhan riil masyarakat dengan alokasi anggaran pada masing-masing satuan kerja secara pasti.

Pemahaman terhadap Musrenbang akhirnya diinterpretasikan secara berbeda, tergantung dari sudut pandang yang melihatnya. Dalam Sudut pandang warga musrenbang merupakan suatu agenda tahunan yang menjadi aktivitas rutin kecamatan dan kelurahan, dan hanya menjadi ajang silaturahmi biasa aktor-aktor yang biasa diundang untuk berperan serta dalam menyusun usulan program dan kegiatan terjadi program/kegiatan tidak sesuai dengan hasil musrenbang yang telah di laksanakan. Seringkali berbagai program dan kegiatan yang di hasilkan dalam musrenbang itu tereliminasi di kalangan atas.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Seiring dengan era globalisasi dan perkembangan modernisasi, dengan dasar tetap menjamin ketebukaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka lahir sebuah inovasi perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi yakni E- Musrenbang. E- Musrenbang lahir sebagai sebuah inovasi perencanaan pembangunan berbasis IT untuk membuka partisipasi masyarakat selebar- lebarnya terhadap berbagai usulan pembangunan. Di sisi lain, keberadaan E- Musrenbang juga dinilai mampu memotong proses- proses panjang penjangkaran usulan pembangunan di masyarakat agar usulan yang masuk lebih tepat, terarah dan akurat.

Dilihat dari sudut pandang para pelaksana kegiatan sudah efektif, karena melalui aplikasi E-musrenbang sudah sesuai dengan tahapan dan tata cara, Selain itu juga memudahkan yang direncanakan karena sudah tertata, sudah tersusun, dan menggunakan dokumentasi. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat perencanaan yang dibuat melalui E- Musrenbang masih belum efektif karena yang di usulkan belum tentu bisa terealisasikan karena tidak ada mata anggarannya. Usulan yang diterima dibatasi dan tidak semua bisa di usulkan kelurahan memilih prioritas sebanyak 10 usulan, sedangkan melalui rembuk warga sebanyak 20 usulan

setiap kelurahan yang ditentukan dari sejumlah lingkungan yang ada. Kemudian dari kecamatan memverifikasi usulan prioritas di Kota Medan.

5.2 SARAN

1. Harapannya usulan yang ada di tingkat bawah bisa direalisasikan agar keinginan masyarakat bisa terpenuhi dan merasakan manfaatnya langsung. Kemudian kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB akan membantu pemerintah untuk membangun perencanaan yang sudah ditetapkan.
2. Kemudian usulan yang sudah diterima oleh BAPPEDA dan OPD terkait, harus lebih konsisten merealisasikan perencanaan melalui E-Musrenbang sehingga masyarakat merasakan perubahan dari pembangunan yang sudah direncanakan.
3. Partisipasi masyarakat diharapkan kedepannya lebih baik agar masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam proses perencanaan yang dilaksanakan penguatan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan. Karena dengan keterlibatan masyarakat, maka tujuan Musrenbang itu akan tercapai, yaitu mendapatkan keputusan bersama dalam konteks merencanakan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi, maka program pembangunan akan lebih menjawab persoalan-persoalan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Agung,Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Pembaharuan.
- Edy Sutrisno, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta.1987.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Moenir, AS. 2000. Manajemen Pelayanan. Tarsito, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. Sekilas Ilmu Pemerintahan, Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad. Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Siagian,Sondang.,P. 2008.Manajamen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. Manajemen Edisi Kesepuluh. Jakarta: penerbit Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-undang :

- Permendagri No.98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah
- Undang-undang No.54 Tahun 2010 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Referensi Jurnal :

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/download/387/722>

di akses tanggal 3 Maret 2020 22:30

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14794> di akses tanggal 3 Maret 2020 22:35

<http://jurnalmandiri.com/index.php/mandiri/article/view/6>

di akses tanggal 4 Maret 2020 10:00

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1059784&val=15861&title=IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20EMUSRENBANG%20DALAM%20PERENCANAAN%20PEMBANGUNAN%20PARTISIPATIF%20DI%20KOTA%20PALOPO> di akses tanggal 4 Maret 2020 10:20

Pedoman Wawancara

Yang terhormat, bapak/ibu dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul **“PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN”**. Maka saya mohon bapak/ibu dapat membantu menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi bagian instrument penelitian saya. Atas kesedian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS :

Nama :

Umur :

Jabatan :

A. Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana perencanaan e-musrenbang di laksanakan ?
2. Menurut bapak/ibu, apakah dengan adanya e-musrenbang perencanaan di kelurahan sudah tepat sasaran dan terarah ?
3. Menurut bapak/ibu, bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan untuk mendukung pelaksanaan e-musrenbang?
4. Menurut bapak/ibu, bagaimana efektivitas dan efisiensi perencanaan melalui e-musrenbang di kelurahan?

B. Terwujudnya Prinsip *good governance*

1. Menurut bapak/ibu, apakah dengan adanya e-musrenbang perencanaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan ?

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-musrenbang ?
3. Menurut bapak ibu, sejauh ini bagaimana akuntabilitas perencanaan e-musrenbang di kelurahan?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 070/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Jumadil Akhir 1441 H
31 Januari 2020 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ELFA SAFIRA**
N P M : 1603100103
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ELFA SAFIRA
 NPM : 1603100103
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	27/02	Perbaikan Pedoman wawancara I	<i>[Signature]</i>
2	28/02	Perbaikan Pedoman wawancara II	<i>[Signature]</i>
3	2/03	Perbaikan struktur organisasi, Deskripsi hasil wawancara	<i>[Signature]</i>
4	3/03	Perbaikan deskripsi hasil wawancara, Abstrak	<i>[Signature]</i>
5	4/03	Perbaikan Pembahasan, Abstrak, Deskripsi hasil wawancara	<i>[Signature]</i>
6	5/03	Perbaikan Pembahasan, Abstrak, Tanda Baca	<i>[Signature]</i>
7	6/03	Perbaikan Abstrak, Tanda Baca	<i>[Signature]</i>
8	7/03	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, ⁰⁹..... MARET..... 2020.....

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(.....)

(.....)

(.....)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 15 JANUARI 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ELFA SAFIRA
NPM : 1603100103
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 975/SK/II.3/UMSU-03/F/20.18 tanggal 23 DESEMBER 2019 dengan judul sebagai berikut :

PEMANTARTAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN
KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsosal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(..... ELFA SAFIRA)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 10.029/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **23 Desember 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ELFA SAFIRA**
N P M : 1603100103
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN**

Pembimbing : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 29 Rabiul Akhir 1441 H
26 Desember 2019 M



Dekan

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan I.A.P.....
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 23 DESEMBER 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ELFA SAFIRA.....
N P M : 1203100103.....
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK.....
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 31.59

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Pemanfaatan E-MUSrenbang dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan daerah di tingkat kelurahan kota Medan	st
2	Fungsi Pengawasan Lurah Untuk Meningkatkan Model Etika Pelayanan Publik yang profesional di kantor Lurah Sei Kera Hilir I kec. Medan Perjuangan	
3	Kinerja Pelayanan Bus Trans Mebidang Untuk Meningkatkan standar Pelayanan umum di kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 23 DESEMBER 2019


(...ELFA SAFIRA.....)

Ketua,


(.....)

Pembimbing : Nini Kurniasih

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jum'at, 24 Januari 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ELFA SAFIRA	1603100103	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELUARAHAN KOTA MEDAN
2	SOPIAH RAZMA NASUTION	1603100051	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERDA NO 5 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
3	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	1603100036	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDIMPUAN
4	MAULINA SARTIKA	1603100003	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	FEBY VERONIKA DAMANIK	1603100110	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN UDAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN, DELI SERDANG

Medan, 25 Jumadil Awal 1441 H

21 Januari 2020 M

a.n. Dekan
 Wakil Dekan

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elfa safira

NPM : 1603100103

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul skripsi : PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELURAHAN KOTA MEDAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan di daftar pustaka sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 15 Juni 2020

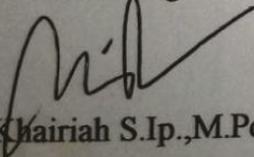
Hormat saya,



Elfa safira

Diketahui,

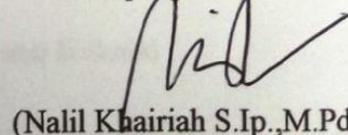
Pembimbing



(Nalil Khairiah S.Ip., M.Pd)

Disetujui

Ketua program studi



(Nalil Khairiah S.Ip., M.Pd)

ELFA SAFIRA

Medan, 28 September 1997



(+62) 878 8144 1011



elfasafira82@gmail.com



Jalan Pimpinan Nomor 29 kec.
Medan Perjuangan Medan,
Sumatera Utara 20233

TENTANG SAYA

Saya adalah orang yang suka tantangan dan belajar dengan pengalaman, karena pengalaman adalah cara saya untuk mengembangkan kompetensi diri dan keahlian. saya juga suka berkomunikasi dan mudah bergaul dengan orang-orang disekitar. Saya bisa bertanggung jawab, dan bekerja sama ketika mendapatkan tugas atau pekerjaan yang diberikan.

SPESIALISASI

COMPUTER

Ms. Word
Ms. Excel
Ms. Power Point
Photoahop

KEMAMPUAN DIRI

Kerja sama	★★★★★
Komunikasi	★★★★★
Adaptasi	★★★★★
leadership	★★★★★

PENDIDIKAN

Universitas
Muhammadiyah
Sumatera Utara

Administrasi Publik

IPK 3.63

HOBİ



ORGANISASI

- 2017-2018 ANGGOTA DIVISI BIDANG BINA DESA
- 2018-2019 SEKRETARIS UMUM HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UMSU

PENGALAMAN

- DUTA KERJASAMA PELATIHAN SOFTSKILL CAREER DEVELOPMENT AND ALUMNI CENTER (CDAC)
- 2017 PELATIHAN OUTBOND MANAJEMEN TRAINING SKILL
- DELEGASI TEMU ADMINISTRATOR MUDA INDONESIA DI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG
- 2018 DELEGASI TEMU ADMINISTRATOR MUDA INDONESIA DI UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
- PELATIHAN PUBLIC RELATION HUMAS YUNIOR DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BEASISWA

- 2018 | Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)

